

Zoning: Journal of Urban and Regional Planning

Vol 2, No 1, tahun 2025, 22 - 32

P-ISSN: 3024 and E-ISSN: 8817 https://jpplt.ubb.ac.id/index.php/zoning/index

FORMULASI KEBIJAKAN ROADMAP INOVASI DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

FORMULATION OF THE REGIONAL INNOVATION ROADMAP POLICY FOR PRINGSEWU REGENCY

Baiq Rindang Aprildahani 1^{a)*}, Verlina Agustine 2^a, Surya Tri Esthi Wira Hutama 3^a, Chrisna Trie Hadi Permana 4^b aPerencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan; <u>rindang.aprildahani@pwk.itera.ac.id</u> bPerencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Info Artikel:

• Artikel Masuk: 4/7/2025

• Artikel diterima: 10/7/2025

• Tersedia Online: 17/7/2025

ABSTRAK

Inovasi daerah merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi dan daya saing. Sesuai dengan arahan kebijakan nasional, suatu daerah perlu memiliki Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mempercepat kemajuan suatu daerah. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupatan di Provinsi Lampung yang memiliki beragam potensi. Kabupaten Pringsewu telah memiliki SIDa untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerahnya. Akan tetapi, Kabupaten Pringsewu masih perlu arahan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah terkait penguatan SIDa agar implementasi SIDa dapat berjalan optimal. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui analisis SWOT, penelitian ini bertujuan menyusun formulasi kebijakan Roadmap SIDa untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Substansi Roadmap penguatan SIDa disusun berdasarkan peraturan bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Adapun hasil kebijakan penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu adalah membentuk lembaga penelitian dan pengembangan yang menyelenggarakan inovasi daerah, membuat program inisiatif inovasi, melakukan kegiatan kolaborasi, membentuk forum penelitian dan pengembangan daerah, dan melengkapi sarana untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Pringsewu.

Kata Kunci: Inovasi Daerah, Kabupaten Pringsewu, SIDa

ABSTRACT

Regional innovation is an important factor in supporting regional development, especially in improving economic development performance and competitiveness. Following national policy directions, a region needs to have a Regional Innovation System (SIDa) to accelerate the progress of a region. Pringsewu Regency is one of the districts in Lampung Province that has various potentials. Pringsewu Regency has already establish SIDa to develop and utilise the potential of the region. However, Pringsewu Regency still needs further policy direction by the Regional Government related to strengthening SIDa so that the implementation of SIDa can run optimally. Using qualitative research methods through SWOT analysis, this research aims to formulate the Roadmap of SIDa for strengthening the Regional Innovation System (SIDa). The substance of the Roadmap of SIDa based on the joint regulation of the Minister of State Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 03 of 2012 and the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 36 of 2012 concerning Strengthening the Regional Innovation System. The policy direction for strengthening the SIDa of Pringsewu Regency is to establish a research and development institution that organises regional innovation, create an innovation initiative programme, conduct collaborative activities, establish a regional research and development forum, and equip facilities to improve the quality of human resources in Pringsewu Regency.

Keyword: Regional Innovation, SIDa, Pringsewu Regency

Cara men-sitasi (APA 6th Style):

Aprildahani, B. R., Agustine, V., Hutama, S. T. E. W., & Permana, C. T. H. (2025). Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu. Zoning: Journal of Urban and Regional Planning, 2(1), 22-32.

Kabupaten Pringsewu. Zoning: Journal of Urban and Regional Planning, 2(1), 22-32.

Doi: 10.33019/zoning.v2i1.22

1. PENDAHULUAN

Inovasi merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi dan daya saing. Inovasi meliputi berbagai upaya dalam rangka menemukan strategi, program, dan kegiatan yang mendorong penambahan nilai tambah (value added) dan fungsi dari suatu komoditas, hal, praktek, dan sistem kerja (Holden, 2008). Membawa inovasi dan kreativitas dasarnya dikembangkan oleh daerah mengarah ke layanan yang lebih baik penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dasar, fasilitas pendukung, perumusan peraturan daerah mendorong pembangunan ekonomi kawasan ramah lingkungan industri pariwisata berkelanjutan sumber daya, budaya, masyarakat dan promosi regional bersama untuk menarik lebih banyak turis dan investor masuk wilayah (Suhada & Ratmono, 2019). Kebijakan pemerintah dapat mempromosikan atau menghambat inovasi (Patanakul & Pinto, 2014) serta ekosistem inovasi penting untuk mendukung inovasi (Andhika, 2018). Kebijakan inovasi adalah kerangka acuan yang bertujuan untuk mendorong organisasi dalam berinovasi, baik melalui teknologi, fasilitas yang ada atau melalui segala hal yang mendukung inovasi agar organisasi dapat berfungsi dengan baik (Schumpeter dan OECD dalam Mahardika, 2019). Zulfia, dkk (2023) menyimpulkan bahwa sistem inovasi mencakup basis ilmiah-teknis (kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian dan pengembangan serta perencanaan) dan basis produksi (kegiatan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan masyarakat luas) serta pemanfaatan dan penyebarluasannya dalam masyarakat.

Pengembangan inovasi daerah sesuai dengan arahan kebijakan nasional. Berawal dari UU No. 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. PP No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah yang mengamanatkan penguatan sistem inovasi daerah dan selanjutnya Peraturan Bersama No. 03/2012 dan No 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan suatu daerah, merupakan agenda nasional sesuai UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat akan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi dan pemerintah daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang melakukan inovasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Adapun sistem inovasi daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. PP No 38/2017 juga menjelaskan kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam (a.) Roadmap penguatan SIDa; (b.) RPJMD; dan (c.) RKPD. Oleh karena itu, roadmap penguatan SIDa sangat penting disusun sebagai langkah pemerintah daerah melalui arahan kebijakan untuk menguatkan SIDa.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupatan di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 625 km². Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 131 desa/kelurahan (126 desa dan 5 kelurahan). Letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di Jalur Lintas Barat yang merupakan salah satu jalur tersibuk di Provinsi lampung menuju sejumlah provinsi di pantai barat Sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan kecil, menengah maupun usaha perdagangan besar.

Berdasarkan potensi pengembangan yang terdapat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu 2017-2022, pengembangan wilayah atau kawasan budidaya mencakup bidang budidaya pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman dan peruntukan lainnya. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai sebesar 2,84 tiriliun atau 25,39 persen. Lapangan usaha pemberi kontribusi terbesar kedua yaitu Industri Pengolahan yang mencapai 14,81 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya sebesar 15,46 persen. Adapun sub kategori yang menyumbang peranan terbesar adalah industri makanan dan minuman, industri barang galian bukan logam dan industri karet, batang dari karet dan plastik.

Pada dasarnya permasalahan utama yang terjadi yang menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan inovasi pembangunan di Kabupaten Pringsewu adalah belum kuatnya orientasi, fokus, dan sistematika alur pengembangan inovasi. Pada aspek ekonomi misalnya, berbagai permasalahan masih belum dapat diatasi secara menyeluruh, namun pemerintah daerah cenderung mengembangkan berbagai sektor dengan harapan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pada sektor utama pertanian misalnya, beberapa masalah antara lain belum optimalnya produksi dan pengelolaan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, serta tingginya alih fungsi lahan. Sedangkan sektor perikanan air tawar yang mulai dikembangkan masih terkendala oleh sarana prasarana, pengelolaan pemasaran, dan keterkaitan rantai usaha yang belum optimal sehingga menyebabkan kecenderungan lambatnya penambahan jumlah investor. Hal tersebut mengindikasikan belum menariknya daerah ini untuk investasi usaha serta masih rendahnya kontribusi koperasi dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil dan menengah. Kegiatan pembangunan dilaksanakan setiap tahun secara rutin, tetapi belum mengeksplorasi berbagai peluang untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi dan distribusinya.

Kemudian, terkait dengan sektor unggulan kedua pariwisata misalnya, persoalan belum optimalnya pencapaian tingkat kunjungan wisatawan dari target pengembangan pariwisata kabupaten, serta belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana pendukung pariwisata menyebabkan banyak obyek wisata belum mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi daerah. Akan tetapi, program-program pemerintah yang dirancang setiap tahunnya hanya terfokus pada upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan promosi wisata, dan pembinaan pelaku usaha pariwisata, yang hampir sebagian besar programnya adalah *business as usual*, hampir identik setiap tahun. Hal ini menyebabkan produktivitas sektor cenderung berkembang namun tidak pesat dan belum memiliki karakter atau branding image yang kuat.

SIDa terkait dengan seluruh proses pengembangan inovasi antar pemangku kepentingan yang mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi serta pengembangan metode baru untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan efektivitas serta efisiensi kinerja pembangunan daerah, termasuk peningkatan komoditas unggulan, tata kelola, daya saing manusia, serta sistem kerjanya. SIDa Kabupaten Pringsewu sangat penting sebagai kebijakan yang mengarahkan untuk terbentuknya sistem atau kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat untuk pengembangan daerah. Mengikuti arahan PP No 38/2017, roadmap penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu memuat kondisi SIDa saat ini, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa, fokus program dan kegiatan prioritas SIDa, serta indikator ketercapaian kinerja SIDa. Roadmap penguatan SIDa ini diharapkan menjadi instrument yang mengarahkan, mengintegrasikan, dan mempercepat berbagai upaya terkait penelitian, pembelajaran, penerapan teknologi dan lain-lain untuk dapat menciptakan skenario, strategi, program, dan aksi yang menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kapasitas dari pemerintah daerah serta unsur-unsur di bawahnya dalam mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Pringsewu.

Kabupaten Pringsewu. Zoning: Journal of Urban and Regional Planning, 2(1), 22-32.

Doi: 10.33019/zoning.v2i1.22

2. DATA DAN METODE

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Penyusunan Roadmap Penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu menggunakan metode kajian aksi yang juga melibatkan perencanaan kolaborasi atau pendekatan partisipatif sehingga melibatkan aktor lokal/pelaku usaha secara aktif. Selain itu, mengelaborasi antara kajian akademis ilmiah dengan kebutuhan pembangunan, kesiapan stakeholder, dan kapasitas sumber daya eksisting.

Metode yang digunakan dalam penyusunan roadmap inovasi daerah adalah metode penelitian kualitatif dengan cara memetakan data-data sekunder mengenai Kabupaten Pringsewu dalam analisis SWOT, yaitu kategori kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam menciptakan inovasi di Kabupaten Pringsewu. Penetapan kategori SWOT tersebut dilakukan dalam forum group discussions (FGD) bersama perwakilan dari pemangku-pemangku kepentingan di Kabupaten Pringwesu, baik dari pemerintahan, akademisi, swasta, dan masyarakat. Hasil SWOT dalam FGD tersebut merumuskan kondisi SIDa dengan kategori sesuai unsur SIDa, yaitu potensi ekonomi dan sektor unggulan, kelembagaan SIDa, jaringan SIDa, dan sumber daya SIDa.

PP Nomor 38/2017 Tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa ruang lingkup penguatan SIDa meliputi (a.) Kebijakan penguatan SIDa; (b.) Penataan unsur SIDa; dan (c.) Pengembangan SIDa. Kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam (a.) Roadmap penguatan SIDa; (b.) RPJMD; dan (c.) RKPD. Roadmap penguatan SIDa memuat (a.) kondisi SIDa saat ini; (b.) tantangan dan peluang SIDa; (c.) kondisi SIDa yang akan dicapai; (d.) arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa; (e.) fokus dan program prioritas SIDa; dan (f.) rencana aksi penguatan SIDa. Penataan unsur SIDa meliputi (a.) Kelembagaan SIDa; (b.) Jaringan SIDa; dan (c.) Sumber daya SIDa. Pengembangan SIDa meliputi kegiatan (a.) Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di daerah; (b.) Pemetaan potensi dan analisis SIDa; dan (c.) Pemberlanjutan penguatan SIDa. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di daerah dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya. Pemetaan potensi dan analisis SIDa dilakukan melalui (a.) identifikasi dan pengumpulan data; (b.) pemetaan; dan (c.) analisis faktor kebijakan, unsur SIDa, program dan kegiatan. Pemberlanjutan penguatan SIDa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa.

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui (a.) peningkatan pelayanan publik; (b.) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c.) peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah berbentuk (a.) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; (b.) inovasi pelayanan publik; dan/atau (c.) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyusun sistem inovasi daerah Kabupaten Pringsewu, dilakukan idenfitikasi kepada kondisi SIDa, Arahan Kebijakan SIDa, Fokus Program dan Kegiatan Prioritas, serta Indikator Ketercapaian Kinerja.

3.1 Kondisi SIDa

Penjabaran kondisi sistem inovasi daerah Kabupaten Pringsewu dilakukan dalam analisis SWOT dengan kategori sesuai unsur SIDa, yaitu potensi ekonomi dan sektor unggulan, kelembagaan SIDa, jaringan SIDa, dan sumber daya SIDa.

Tabel 1. Kondisi SIDa Kabupaten Pringsewu

Kondisi SIDa	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity	Threat
	5 (,	,	(Peluang)	(Ancaman)
Potensi ekonomi dan sektor unggulan	daya yang melimpah Kegiatan perekonomian pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan telah mendapat perhatian oleh	 Pengembangan sumber daya manusia yang belum optimal, potensi ekonomi belum termanfaatkan dengan baik Belum adanya pembinaan secara berkesinambungan terhadap pelaku usaha kelompok UMKM masih menghadapi kesulitan (permodalan, kemampuan manajerial yang rendah diikuti dengan rendahnya kualitas produk, serta ketertinggalan informasi dan teknologi). 	 Kemampuan SDM dalam penguasaan IPTEK untuk kegiatan perekonomian Usaha berbasis teknologi (e- commerce dan jejaring usaha) 	Dampak dari pandemi covid-19
Kelembagaan SIDa	 Telah ada mempunyai Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah yang memuat ketentuan mengenai inovasi daerah di Pringsewu. Sektor unggulan pertanian memiliki beberapa kelembagaan berupa kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu. 	 Dalam kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu, sebagian besar belum mempunyai bagian kelembagaan yang khusus bertugas menginisiasi inovasi daerah, baik berupa inisiatif, perencanaan sampai pelaksanaan inovasi daerah. Bab X Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah memuat Penilaian dan Penghargaan Inovasi, tetapi belum ada teknis pelaksanaannya untuk 	■ Lembaga pendidikan di Kab Pringsewu dan sekitarnya dapat mendukung inisiatif inovasi daerah untuk wilayah Pringsewu dan pelaksanaannya	 Masih ada ketergantu ngan terhadap pusat dalam hal inisiatif program dan pembiayaan

Aprildahani, B. R., Agustine, V., Hutama, S. T. E. W., & Permana, C. T. H. (2025). Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu. *Zoning: Journal of Urban and Regional Planning, 2*(1), 22-32.

Kondisi SIDa	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
Jaringan SIDa	 Seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu telah menerapkan egovernment untuk mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam pengembangan jaringan, keberadaan institusi 	penguatan budaya inovasi Belum seluruh pelayanan di setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu yang menerapkan teknologi online yang cepat. Kelemahan dalam pengembangan jaringan SIDa adalah masih belum adanya	 Beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Pemda 	 Ancaman yang perlu diperhatika n adalah
	akademisi di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung merupakan kekuatan dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten	masih belum adanya wadah yang mempertemukan berbagai penelitian (hub) terkait Kabupaten Pringsewu. Masih minimnya program stimulatif bagi internal OPD dalam melakukan penelitian. Kelemahan lain adalah belum adanya sarana prasarana yang berperan dalam pengembangan sistem inovasi daerah.	oleh Pemda Kabupaten Pringsewu adalah tingginya penelitian yang berasal dari luar Kabupaten Pringsewu.	n adalah tingginya program inovasi yang telah diterapkan oleh pemda diluar Pringsewu, sehingga hilangnya peluang Kabupaten Pringsewu dalam mewujudka n inovasi daerah.
Sumber daya SIDa	 Jumlah usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang efisien dalam pengembangan inovasi yang lebih banyak Tingkat capaian IPM termasuk dalam kategori menengah atas dengan nilai 	 Masih banyaknya kejadian putus sekolah dan tidak memenuhi kebijakan wajib belajar 9 tahun Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah bahkan kurang dari 50% untuk SMP dan SMA Masih minimnya guru yang memenuhi kualifikasi lulusan S-1/D-IV Masih terdapat konflik sosial dengan rendahnya 	 Pelatihan dan Bimtek yang beragam dalam peningkatan kualitas SDM ASN 	Persaingan nasional atau global terkait kualitas SDM yang sudah berjalan, sedangkan SDM lokal belum banyak bisa ikut didalamnya

Aprildahani, B. R., Agustine, V., Hutama, S. T. E. W., & Permana, C. T. H. (2025). Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah

 $Kabupaten\ Pringsewu.\ Zoning:\ Journal\ of\ Urban\ and\ Regional\ Planning,\ 2(1),\ 22-32.$

Doi: 10.33019/zoning.v2i1.22

Kondisi SIDa	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	70,3 serta merupakan peringkat ketiga se- Provinsi Lampung Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Murni yang terus meningkat setiap tahunnya Terdapat sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang dapat mendukung peningkatan inovasi sesuai potensinya	kemauan untuk melakukan inovasi Sering terjadinya rolling jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang SDM serta angka rata- rata lama menjabat juga menjadi rendah		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.2 Arahan Kebijakan SIDa

Dalam mewujudkan SIDa di Kabupaten Pringsewu, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan potensi ekonomi dan sektor unggulan, kelembagaan, jaringan dan sumber daya SIDa di Kabupaten Pringsewu. Strategi tersebut disusun berdasarkan analisis SWOT kondisi SIDa Kabupaten Pringsewu yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan:

- 1. Melakukan program dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi dibidang pertanian, perkebunan, dan perikanan serta industri.
- 2. Melakukan program yang memfasilitasi UMKM untuk berinovasi dalam pengelolaan industri kreatif.
- 3. Perbup Pringsewu 25/2021 Tentang Inovasi Daerah bagian kedua mengenai Kelembagaan Inovasi daerah memuat bahwa perangkat daerah sesuai bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif inovasi daerah. Setiap kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pringsewu perlu membuat program untuk menggiatkan inovasi daerah, bahkan beberapa OPD sudah melakukan inovasi tapi perlu dioptimalisasi.
- 4. Perlu pembentukan kelembagaan masyarakat untuk segala sektor (baik itu pertanian, pariwisata, UMKM, pendidikan, kesehatan, dll) sehingga lebih inisiatif dalam inovasi daerah terutama peningkatan nilai produktivitas (seperti mengoptimalkan BUMDes yang saat ini menggalakan program One Village One Product). Juga melibatkan perguruan-perguruan tinggi dalam giat berinovasi untuk Kabupaten Pringsewu (Mukhlish, 2018).
- Membentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah.
- 6. Peningkatan efisiensi dan efektifitas lembaga formal dan non-formal dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan urusan pemerintahan lainnya serta produktivitas sektor.
- 7. Melakukan program stimulasi bagi OPD dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang menjawab kebutuhan Kabupaten Pringsewu
- 8. Melakukan program yang mewadahi inovasi daerah baik pada ruang-ruang penelitian, diskusi, dll

- 9. Melakukan program yang mewadahi SDM Masyarakat dalam menghasilkan inovasi sesuai kebutuhan Kabupaten Pringsewu
- 10. Melakukan program peningkatan kualitas SDM ASN dalam kesiapan untuk menghasilkan inovasi yang dapat memajukan Kabupaten Pringsewu.

3.3 Fokus Program dan Kegiatan Prioritas

Berikut adalah penentuan fokus program dan kegiatan prioritas dalam hal penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Pringsewu. Fokus program dan kegiatan prioritas tersebut disusun berdasarkan rumusan arahan kebijakan SIDa dan analisis kondisi SIDa. Fokus program berarti program yang harus dilakukan demi mewujudkan penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Pringsewu sesuai komponen unsur SIDa. Adapun kegiatan prioritas adalah rincian kegiatan dari fokus program.

Tabel 2. Fokus Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pringsewu

	Tabel 2. Fokus Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pringsewu					
No	Komponen	Fokus Program	Kegiatan Prioritas			
1	Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan	 Menentukan dan/atau membentuk lembaga khusus yang mendukung kegiatan inovasi bidang ekonomi Membentuk program / kegiatan yang menjamin keberlangsungan kegiatan inovasi di bidang ekonomi 	 Menentukan dan/atau membentuk lembaga khusus yang mengakomodir kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis inovasi Membentuk lembaga khusus yang mengakomodir pembentukan dan/atau pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan kelompok tani dan pelaku usaha Menambah program pembinaan dan pelatihan kelompok pertanian dan perkebunan, serta pelaku usaha melalui pendekatan inovasi teknologi 			
2	Kelembagaan SIDa	 Membentuk lembaga untuk meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah Meningkatkan budaya inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu 	 Pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah. Membuat program yang menggiatkan inisiatif inovasi daerah di setiap OPD, serta melibatkan kelembagaan masyarakat dan perguruan tinggi untuk inisiatif inovasi daerah dengan meningkatkan insentif 			
3	Jaringan SIDa	 Melakukan pembentukan forum penelitian dan pengembangan daerah Menjalin kerjasama dengan akademika dalam mendukung penyelenggaraan sistem inovasi daerah Melakukan pembentukan kegiatan / event dalam mendukung sistem inovasi daerah 	 Melakukan perjanjian kerjasama pada beberapa institusi akademik, LSM maupun swasta dalam menyelenggarakan sistem inovasi daerah Menyusun program kegiatan untuk menyelenggarakan sistem inovasi daerah Melakukan kegiatan kolaborasi untuk menjalin jaringan dalam mendukung sistem inovasi daerah Melakukan pembentukan forum penelitian dan pengembangan daerah 			

Aprildahani, B. R., Agustine, V., Hutama, S. T. E. W., & Permana, C. T. H. (2025). Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah

Kabupaten Pringsewu. Zoning: Journal of Urban and Regional Planning, 2(1), 22-32.

Doi: 10.33019/zoning.v2i1.22

No	Komponen	Fokus Program	Kegiatan Prioritas
			yang diakomodasi oleh Bidang yang membawahi kelitbangan
4	Sumber Daya SIDa	 Pengembangan dan penguatan pendidikan dan pelatihan inovasi untuk pengembangan inovasi Pengembangan sosialisasi pentingnya berinovasi 	 Peningkatan kualitas SDM dengan sarana pendidikan Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang teknologi dan informasi

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.4 Indikator Ketercapaian Kinerja

Program inovasi yang baik seringkali kurang optimal karena kurangnya komitmen dari pelaksana yang baik, maka harus ada indikator ketercapaian kinerja dari beberapa program dan kegiatan yang telah disusun (Hutagalung & Hermawan, 2018). Terdapat beberapa variabel dan indikator ketercapaian kinerja di Kabupaten Pringsewu dalam mengukur keberhasilan penguatan SIDa di Kabupaten Pringsewu berdasarkan komponen unsur SIDa. Variabel dan indikator tersebut adalah hal-hal yang harus terbentuk di Kabupaten Pringsewu dengan inisiasi dari pemerintah dalam mencapai penguatan SIDa di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 3. Indikator Ketercapaian Kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu

	Tabel 3. Indikator Ketercapaian Kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu				
No	Komponen	Variabel	Indikator		
1	Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan	 Lembaga pendamping dan pembina kelompok pertanian dan perkebunan serta pelaku usaha Pembuatan program/kegiatan inovasi yang mendukung ekonomi bagi kelompok pertanian dan perkebunan, pelaku usaha, melibatkan dinas koperasi dan umkm, perguruan tinggi dan lembaga pengabdian masyarakat 	 Lembaga integrasi kegiatan inovasi bidang ekonomi Penjaminan mutu kegiatan inovasi Jumlah program pendukung kegiatan ekonomi berbasis inovasi Jumlah perusahaan/usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Program pembinaan dan pelatihan kelompok pertanian dan perkebunan, serta pelaku usaha 		
2	Kelembagaan SIDa	 Pembentukan lembaga yang meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah Pembuatan program- program yang meningkatkan budaya inovasi daerah 	 Terbentuknya badan penelitian dan pengembangan Kab Pringsewu Jumlah inisiatif inovasi daerah meningkat dari OPD, perguruan tinggi dan kelembagaan masyarakat 		
3	Jaringan SIDa	 Komunikasi antar Lembaga dalam pengembangan Inovasi Daerah Upaya mobilisasi Sumber Daya Manusia 	 Jumlah partisipan yang mengikuti komunikasi pengembangan inovasi daerah Jumlah Kerjasama dengan akademisi, LSM dan Swasta 		

Aprildahani, B. R., Agustine, V., Hutama, S. T. E. W., & Permana, C. T. H. (2025). Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah

 $Kabupaten\ Pringsewu.\ Zoning:\ Journal\ of\ Urban\ and\ Regional\ Planning,\ 2(1),\ 22-32.$

Doi: 10.33019/zoning.v2i1.22

No	Komponen	Variabel	Indikator
		Pemanfaatan sarana prasarana dan Hak Kekayaan Intelektual	dalam pengembangan inovasi daerah Jumlah program kegiatan antar OPD dalam pengembangan inovasi daerah Jumlah program kegiatan antar OPD dalam pengembangan keterampilan / pengetahuan SDM Jumlah paten yang didaftarkan Jumlah sarana prasarana pendukung SIDa Jumlah publikasi terkait inovasi daerah Jumlah Program pendukung Inovasi Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti program Inovasi Daerah
4	Sumber Daya SIDa	 Pengembangan dan penguatan pendidikan dan pelatihan inovasi untuk pengembangan inovasi Pengembangan sosialisasi pentingnya berinovasi 	 Persentase pelayanan sarana pendidikan Jumlah guru kualifikasi lulusan S-1/D-IV Persentase Angka Partisipasi Murni Jumlah keikutsertaan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang teknologi dan informasi

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4. KESIMPULAN

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu sangat penting sebagai kebijakan yang mengarahkan untuk terbentuknya sistem atau kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat untuk pembangunan daerah. Mengikuti arahan PP No 38/2017, roadmap penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu memuat (1) Kondisi SIDa saat ini; (2) Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa; (3) Fokus program dan kegiatan prioritas SIDa; dan (4) Indikator ketercapaian kinerja SIDa. Roadmap tersebut disusun dalam kategori unsur SIDa, yaitu potensi ekonomi dan sektor unggulan, kelembagaan, jaringan dan sumber daya SIDa.

Berdasarkan analisis kualitatif terhadap data-data sekunder, arahan untuk penguatan SIDa di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

- 1. Pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah;
- 2. Membuat program yang menggiatkan inisiatif inovasi daerah di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- 3. Melakukan kegiatan kolaborasi untuk menjalin jaringan dalam mendukung sistem inovasi daerah antar pemerintahan, dengan akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat dan swasta;
- 4. Melakukan pembentukan forum penelitian dan pengembangan daerah yang diakomodasi oleh bidang yang membawahi kelitbangan;
- 5. Peningkatan kualitas SDM dengan sarana pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bidang teknologi dan informasi.

Aprildahani, B. R., Agustine, V., Hutama, S. T. E. W., & Permana, C. T. H. (2025). Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu. *Zoning: Journal of Urban and Regional Planning, 2*(1), 22-32. Doi: 10.33019/zoning.v2i1.22

5. PERNYATAAN RESMI

Terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang telah membantu dalam pendanaan penelitian dan proses analisis penelitian dengan bersedia mengikuti Forum Group Discussion.

6. REFERENSI

- Andhika, L. R. (2018). Element and Factor Governance Innovation in Government Public Service. Jurnal Balitbangda, 6(3), 207–222.
- Holden, M. (2008). Social Learning in Planning: Seattle's Sustainable Development Codebooks. *Progress in Planning*, 69(1), 1–40.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Deepublish, 1–215.
- Mahardika, R. B. (2019). Mengenal Berbagai Kebijakan Inovasi di Berbagai Negara. Forbil Institut.
- Mukhlish, Basuki M. (2018). Kolaborasi Antara Universitas, Industri dan Pemerintah Dalam Meningkatkan Inovasi dan Kesejahteraan Masyarakat: Konsep, Implementasi dan Tantangan. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan: Vol. 1: Iss. 1, Article 5.
- Patanakul, P., & Pinto, J. K. (2014). Examining the Roles of Government Policy on Innovation. Journal of High Technology Management Research, 25(2), 97-107.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Suhada, B., & Ratmono. (2019). Desain Pengembangan inovasi Daerah di Kabupaten Lampung Timur. DERIVATIF: Jurnal Manajemen, 13(2), 27–33.
- Zulfia, Haira, dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Pada Pemerintah Kota Padang. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 14, Nomor 2.